# DISPARITAS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**Eko Hermawati AS**
BPS Kabupaten Magelang

**ABSTRAK**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakilil oleh pengeluaran per kapita.

Semangat pembangunan nasional yang bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi masih menghadapi kendala. Karena beberapa hal pembangunan manusia masih belum merata. Hal ini berdampak pada lahirnya disparitas pembangunan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat disparitas indeks pembangunan manusia pada kabupaten dan kota, dimana wilayah administrasi di Indonesia dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia selama tahun 2010-2017 dengan menggunakan uji kontigensi. Dari uji tersebut didapatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia belum terdistribusi merata antara kabupaten dan kota.

Kata kunci: Disparitas, Pembangunan Manusia, Kontigensi

## PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu butir penting dalam prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita yang kelima. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan social untuk rakyat di tahun 2019.

Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi sesuai dengan tujuan pembangunan. Namun berbagai macam faktor menyebabkan kemajuan pembangunan manusia menjadi berbeda-beda. Hal ini berdampak pada lahirnya disparitas pembangunan manusia antarwilayah (BPS, 2018 : 57).

## LANDASAN TEORI

Pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, peingkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomi dan sosial (Todaro, 2011: 27).

Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah kabupaten dan kota dalam

mempengaruhi lokasi aktivitas ekonomi, agaknya semakin penting dewasa ini. Berbagai studi dalam bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998). Ohmae, seperti dikutip Kuncoro (2015) dengan lantang berpendapat bahwa dunia tanpa batas, *redion state* akan menggantikan negara bangsa *(nasional states)* sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Ohmae, 1995).

Pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi, pertumbuhan industri tidak akan berjalan lancer, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu (Todaro, 2011: 3).

Tujuan pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Tujuan pembangunan harus memperhatikan proses pemerataan atau distribusi nilai tambah tertentu dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kesenjangan atau ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro, 2015: 263).

Peningkatan produktivitas pekerja, akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan dengan upah riil yang berjalan lambat, mengurangi jumlah pengganggguran (Mankiw, 2007: 170).

Indikator digunakan untuk memberikan sinyal ke mana ekonomi bergerak (Baumohl, 2008: xv-xix). Indikator kunci pembangunan secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Yang termasuk sebagai indikator ekonomi adalah pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator sosial (Kuncoro, 2015: 3).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat/penduduk. Ukuran ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 1990. Tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu *Longevity* (umur panjang dan sehat), *Knowledge* (pengetahuan), dan *Decent Living Standard* (Standar hidup layak). IPM menjelaskan kemampuan penduduk untuk menikmati pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan yang sesungguhnya. Tujuan untama pembangunan adalah menciptakan

lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. (Hasbullah, 2012: 113).

Status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaa perkembangan pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi empat kelompok dengan kriteria sebagai berikut

1. Sangat Tinggi : IPM $\geq 80$
2. Tinggi : $70 \leq$ IPM $< 80$
3. Sedang : $60 \leq$ IPM $< 70$
4. Rendah : IPM $< 60$

Kriteria perkotaan (Tarigan, 2014: 157) kepadatan penduduk per $km^2$, persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya pertanian atau non pertanian, persentase rumah tangga yang memiliki telepon, persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik.

## METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk melihat disparitas Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan uji kontigensi. Data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia metode baru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik mulai tahun 2010.

Uji kontigensi digunakan untuk menguji hubungan dua fenomena. Hipotesis dalam uji ini adalah :

Ho : Tidak ada hubungan antara status kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia

H1 : Ada hubungan antara status kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dibagi dikelompokkan dalam status Kabupaten dan Kota, serta dibagi dalam 4 kriteria, Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, dan Rendah. Sangat Tinggi yaitu IPM $\geq 80$, Tinggi yaitu IPM bernilai $70 \leq$ IPM $< 80$, Sedang yaitu IPM bernilai $60 \leq$ IPM $< 70$, dan Rendah yaitu IPM bernilai $< 60$.

Derajat bebas dalam uji ini

df = (jumlah baris-1) x (jumlah kolom -1)

df = (4-1) x (2-1) = 3

Taraf nyata = 0,05, sehingga nilai kritis ($X^2$ tabel ) = 7,815. Sedangkan untuk frekuensi yang diharapkan untuk mendapatkan $X^2$ hitung :

$$Frekuensi_yang_diharapkan = \frac{(Total_baris)(Total_kolom)}{Total_keseluruhan}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia

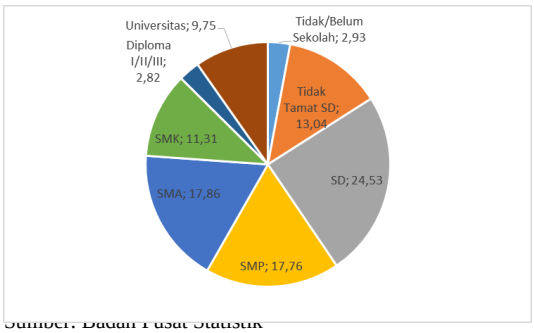


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Penduduk 15 Tahun ke Atas Seminggu yang Lalu Bekerja Berdasakan Tingkat Pendidikan, Februari 2019

Tenaga kerja yang handal, selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2019 yang dilakukan oleh BPS, didapat bahwa tenaga kerja lulusan SD masih mendominasi penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu pada Februari 2019.

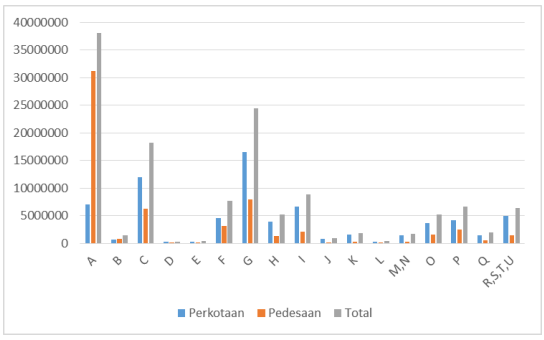


A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran
H Transporrtasi dan Pergudanan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
L. Real Estate
M, N. Jasa Perusahaan
P. Jasa Kesehatan
O. Administrasi Pemerintah
Q. Jasa Kesehatan
R,S, T, U. Jasa Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Penduduk 15 Tahun ke Atas Seminggu yang Lalu Bekerja Berdasakan Lapangan Kerja, Februari 2019

Sejalan dengan tingkat pendidikan, pertanian masih menjadi lapangan kerja terbanyak yang menyerap tenaga kerja di Indonesia untuk daerah pedesaan. Sementara untuk daerah perkotaan, sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar.

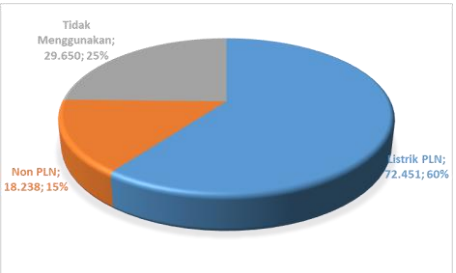


## B. Fasilitas Listrik dan Komunikasi

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik di Indonesia, 2018

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2018, sebagian besar keluarga di Indonesia sudah menggunakan listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Keberadaan listrik mendukung seluruh aktivitas pembangunan.

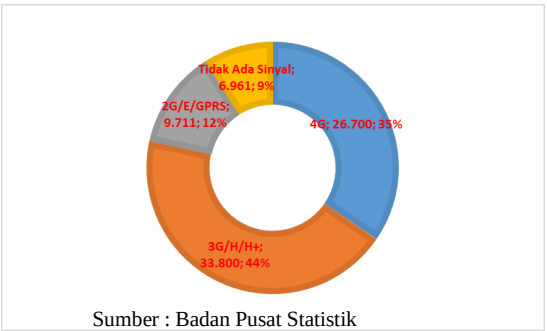


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4. Jumlah Desa Penerima Sinyal Internet di Indonesia, 2018

Selain listrik, dilihat dari sinyal internet yang didapat di desa, hanya 9 persen desa yang tidak ada sinyal. Meski

tidak semua desa bisa mendapatkan sinyak 4G.

Sumber daya yang unggul dalam pembangunan perlu dipersiapkan. Karenanya, studi hubungan antara status kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia dilakukan mengingat fasilitas listrik maupun komunikasi sudah memadai.

## C. Indeks Pembangunan Manusia

| Tahun | Pertumbuhan |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2010-2011 | 0,84 |
| 2011-2012 | 0,90 |
| 2012-2013 | 0,91 |
| 2013-2014 | 0,87 |
| 2014-2015 | 0,93 |
| 2015-2016 | 0,91 |
| 2016-2017 | 0,90 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tren Pertumbuhannya

Tren IPM di Indonesia terus mengalami kenaikan. Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia selain ditandai dengan peningkatan level IPM, juga terlihat dari status pembangunan manusia. Sejak tahun 2016, Indonesia memasuki pembangunan manusia dengan status tinggi.

Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6. Umur Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia, 2010-2017 (Tahun)

Umur harapan hidup saat lahir Indonesia terus menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

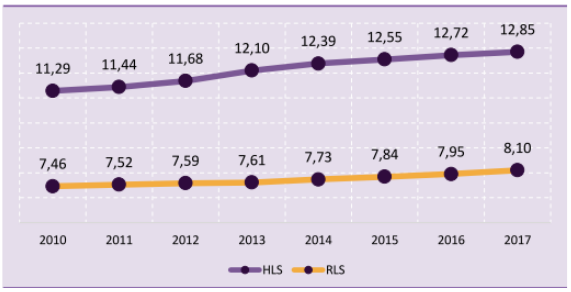


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 7. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2010-2017 (Tahun)

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2010 hingga 2017. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,87 persen per tahun selama tahun 2010-2017. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 1,18 persen per tahun dalam kurun waktu yang lama.

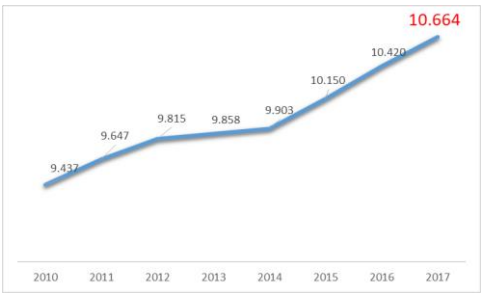


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Indonesia, 2010-2017 (Ribu Rupiah/Tahun)

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 2010 hingga 2017 pengeluaran per kapita Indonesia meningkat sebesar Rp 1.227.000,00 atau tumbuh 1,76 persen per tahun.

## D. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota di Indonesia

### 1. IPM Tahun 2010

Tabel 1. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2010

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 98 | 273 | 13 | 0 | 384 |
| **Kota** | 1 | 28 | 68 | 3 | 100 |
| **Jumlah** | **99** | **301** | **81** | **3** | **484** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tahun 2010, kota yang memiliki IPM rendah adalah Kota Subulussalam di Provinsi Aceh yaitu sebesar 58,97. Menariknya, tidak ada Kabupaten di Indonesia yang memiliki IPM dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan 3 kota yang memiliki IPM sangat tinggi adalah Kota Banda Aceh, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk Kabupaten di Indonesia yang memiliki IPM tinggi adalah Toba Samosir, Karo, Deli Serdang, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Bantul, Sleman, Sidoarjo, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Minahasa.

### 2. IPM Tahun 2011

Tabel 2. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2011

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 83 | 293 | 18 | 1 | 395 |
| **Kota** | 1 | 22 | 76 | 3 | 102 |
| **Jumlah** | **84** | **315** | **94** | **4** | **497** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2011, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten pertama dengan IPM sangat tinggi. Sedangkan untuk status kota dengan IPM sangat tinggi masih terdapat pada 3 kota sebagaimana tahun 2010, yaitu Kota Banda Aceh Kota Jakarta Selatan, dan Kota Yogyakarta. Aceh Tengah

Untuk kabupaten dengan status IPM tinggi bertambah sebanyak 5 kabupaten menjadi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir, Karo,Deli Serdang, Siak, Bintan, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Bantul, Sidoarjo, Gresik, Tabanan, Badung, Gianyar, Berau, dan Minahasa.

Tahun 2011, Kota Subulussalam masih merupakan kota dengan IPM rendah.

### 3. IPM Tahun 2012

Tabel 3. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2012

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 67 | 304 | 23 | 1 | 395 |
| **Kota** | 1 | 20 | 77 | 4 | 102 |
| **Jumlah** | **68** | **324** | **100** | **5** | **497** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tahun 2012, Kabupaten Sleman masih merupakan kabupaten dengan IPM sangat tinggi. Sedangkan untuk Kota dengan IPM sangat tinggi bertambah satu, yaitu Kota Denpasar.

Kabupaten dengan IPM tinggi tahun 2012 bertambah sebanyak 5 kabupaten dari tahun sebelumnya yaitu Aceh Besar, Kampar, Bengkalis, Kudus dan Minahasa Utara. Kota Subulussalam masih menjadi satu-satunya kota dengan IPM rendah.

### 4. IPM Tahun 2013

Tabel 4. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2013

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 62 | 318 | 28 | 1 | 409 |
| **Kota** | 0 | 16 | 81 | 5 | 102 |
| **Jumlah** | **62** | **334** | **109** | **6** | **511** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2013, tidak ada kota yang memiliki IPM rendah. IPM sangat tinggi untuk kota-kota di Indonesia bertambah satu kota yaitu Kota Kendari.

Kabupaten Sleman masih menjadi kabupaten dengan IPM sangat tinggi. Kabupaten dengan

IPM tinggi bertambah sebanyak 5 kabupaten dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Bekasi, Kulon Progo dan Kutai Kartanegara

## 5. IPM Tahun 2014

Tabel 5. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2014

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 52 | 318 | 41 | 1 | 412 |
| **Kota** | 0 | 13 | 83 | 6 | 102 |
| **Jumlah** | **52** | **331** | **124** | **7** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2014, IPM sangat tinggi untuk kota bertambah satu kota yaitu Kota Jakarta Timur. Menyusul kota sebelumnya yaitu Kota Banda Aceh, Kota Jakarta Selatan, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, Kota Kendari. Kabupaten dengan IPM sangat tinggi masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman.

Sedangkan untuk Kabupaten dengan IPM tinggi bertambah sebesar 13 kabupaten dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bener Meriah, Labuhan Batu, Natuna, Purworejo, Boyolali, Sragen, Mojokerto, Magetan, Kutai Timur, Malinau, Kolaka, Biak Numfor dan Mimika

## 6. IPM Tahun 2015

Tabel 6. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2015

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 41 | 317 | 53 | 1 | 412 |
| **Kota** | 0 | 12 | 79 | 11 | 102 |
| **Jumlah** | **41** | **329** | **132** | **12** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2015, kota dengan IPM sangat tinggi bertambah sebanyak 5 kota dari tahun sebelumya yaitu Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Malang. Kabupaten Sleman masih merupakan satu-satunya kabupaten dengan IPM sangat tinggi.

Untuk kabupaten yang berubah dari IPM sedang tahun sebelumnya menuju IPM tinggi bertambah sebesar 12 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Bangka, Belitung, Bandung, Jepara, Tulungagung, Tangerang, Buleleng, Paser, Enrekang, Luwu Timur dan Jayapura. Sedangkan Kabupaten dengan IPM rendah tahun sebelumnya yang berubah menjadi IPM sedang adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pesisir Barat, Belu, Manggarai Barat, Sumba

Barat Daya, Kayong Utara, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur dan Supiori.

### 7. IPM Tahun 2016

Tabel 7. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2016

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 38 | 303 | 70 | 1 | 412 |
| **Kota** | 0 | 9 | 75 | 18 | 102 |
| **Jumlah** | **38** | **312** | **145** | **19** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2016, kota dengan IPM sangat tinggi bertambah sebanyak 7 kota dari tahun sebelumya yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, Kota Makasar, Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Malang. Kabupaten Sleman masih merupakan satu-satunya kabupaten dengan IPM sangat tinggi.

Untuk kabupaten yang berubah dari IPM sedang tahun sebelumnya menuju IPM tinggi bertambah sebesar 17 kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tanah Datar, Agam, Dharmasraya, Pelalawan, Banyumas, Demak, Kendal, Jombang, Nganjuk, Lamongan, Jembrana, Barito Timur dan Tabalong

### 8. IPM Tahun 2017

Tabel 8. Jumlah Kabupaten Kota Berdasarkan Kriteria IPM di Indonesia Tahun 2016

| Status | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten** | 32 | 291 | 87 | 2 | 412 |
| **Kota** | 0 | 8 | 73 | 21 | 102 |
| **Jumlah** | **32** | **299** | **160** | **23** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2017, kota dengan IPM sangat tinggi bertambah sebanyak 3 kota dari tahun sebelumya yaitu Kota Batam, Kota Bekasi dan Kota Palu. Kabupaten dengan IPM sangat tinggi bertambah satu kabupaten yaitu Kabupaten Badung.

Untuk kabupaten yang berubah dari IPM sedang tahun sebelumnya menuju IPM tinggi bertambah sebesar 18 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Dairi, Kerinci, Karimun, Kep. Seribu, Sumedang, Pati, Kediri, Madiun, Klungkung, Sumbawa Barat, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Bulungan, Minahasa Selatan,

Morowali, Konawe dan Maluku Tengah

## E. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia Status Kabupaten dan Kota di Indonesia

Tabel 9. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2010

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 98 | 79 | 273 | 239 | 13 | 64 | 0 | 2 | **384** |
| Kota | 1 | 20 | 28 | 62 | 68 | 17 | 3 | 1 | **100** |
| Jumlah | **99** | **99** | **301** | **301** | **81** | **81** | **3** | **3** | **484** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 10. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2011

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 83 | 67 | 293 | 250 | 18 | 75 | 1 | 3 | **395** |
| Kota | 1 | 17 | 22 | 65 | 76 | 19 | 3 | 1 | **102** |
| Jumlah | **84** | **84** | **315** | **315** | **94** | **94** | **4** | **4** | **497** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 11. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2012

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 67 | 54 | 304 | 258 | 23 | 79 | 1 | 4 | **395** |
| Kota | 1 | 14 | 20 | 66 | 77 | 21 | 4 | 1 | **102** |
| Jumlah | **68** | **68** | **324** | **324** | **100** | **100** | **5** | **5** | **497** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 12. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2013

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 62 | 50 | 318 | 267 | 28 | 87 | 1 | 5 | **409** |
| Kota | 0 | 12 | 16 | 67 | 81 | 22 | 5 | 1 | **102** |
| Jumlah | **62** | **62** | **334** | **334** | **109** | **109** | **6** | **6** | **511** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 13. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2014

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 52 | 42 | 318 | 265 | 41 | 99 | 1 | 6 | **412** |
| Kota | 0 | 10 | 13 | 66 | 83 | 25 | 6 | 1 | **102** |
| Jumlah | **52** | **52** | **331** | **331** | **124** | **124** | **7** | **7** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 14. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2015

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 41 | 33 | 317 | 264 | 53 | 106 | 1 | 10 | **412** |
| Kota | 0 | 8 | 12 | 65 | 79 | 26 | 11 | 2 | **102** |
| Jumlah | **41** | **41** | **329** | **329** | **132** | **132** | **12** | **12** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 15. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2016

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 38 | 30 | 303 | 250 | 70 | 116 | 1 | 15 | **412** |
| Kota | 0 | 8 | 9 | 62 | 75 | 29 | 18 | 4 | **102** |
| Jumlah | **38** | **38** | **312** | **312** | **145** | **145** | **19** | **19** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 16. Tabel Kontigensi IPM Tahun 2017

| Status | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fo | fe | fo | fe | fo | fe | fo | fe | |
| Kabupaten | 32 | 26 | 291 | 240 | 87 | 128 | 2 | 18 | **412** |
| Kota | 0 | 6 | 8 | 59 | 73 | 32 | 21 | 5 | **102** |
| Jumlah | **32** | **32** | **299** | **299** | **160** | **160** | **23** | **23** | **514** |

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

Dari tabel kontigensi tersebut, dapat dihitung hasil *chi-square* uji, dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil uji *chi-square*

| Tahun | $X^2$ Uji | $X^2$ Tabel, Kepercayaan 5% | Kesimpulan |
|---|---|---|---|
| **2010** | 256,461608 | **7,815** | **Tolak Ho** |
| **2011** | 271,664652 | | |
| **2012** | 262,432025 | | |
| **2013** | 280,197242 | | |
| **2014** | 257,56116 | | |
| **2015** | 236,132287 | | |
| **2016** | 225,470045 | | |
| **2017** | 204,024926 | | |

$X^2$ uji lebih besar daripada $X^2$ tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak.

Dari uji di atas dapat disimpulkan bahwa Status Kabupaten dan Kota berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia belum terdistribusi merata di antara kabupaten dan kota.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Meski faktor komunikasi dan fasilitas antara kabupaten dan kota hampir merata di seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia dan status kabupaten dan kota administrasi yang ada di Indonesia berhubungan.

### Saran

Perlu penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia selain dilihat dari status administrasi.

### Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini memandang status kabupaten dan kota dari suatu daerah secara umum. Tidak dibedakan berdasarkan letak geografis, wilayah kepulauan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasbullah, Jousairi. (2012). *Tangguh dengan Statistik.* Jakarta: Nuansa Cendekia.

Kuncoro, Mudrajad. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi. Edisi 6.* Jakarta: Erlangga.

Statistik, Badan Pusat. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia 2017.* Jakarta: BPS.

Statistik, Badan Pusat. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2016.* Jakarta: BPS.

Statistik, Badan Pusat. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia 2015.* Jakarta: BPS.

Statistik, Badan Pusat. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014.* Jakarta: BPS.

Statistik, Badan Pusat. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia 2013.* Jakarta: BPS.

Statistik, Badan Pusat. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2019.* Jakarta: BPS.

Tarigan, Robinson. (2014). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. & Stephen C.Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. & Stephen C.Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Walpole, Ronald E. & Raymond H. Myers. (1995). *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Edisi 4*. Bandung: Penerbit ITB.